
**SOSIALISASI BUDAYA POLITIK TERHADAP PEMILIH PEMULA
DI MAN 1 LAMPUNG TIMUR**

Deri Ciciria¹, Putut Wisnu Kurniawan², Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma³,
Wayan Satria Jaya⁴, Ketut Akeh⁵, Maghrilisa⁶

¹²⁴⁵⁶STKIP PGRI Bandar Lampung

³IAIN Metro Lampung

¹cici201528@gmail.com, ²pututbukan@gmail.com, ³tb.alirachman99@gmail.com,

⁴wayansatriajaya@gmail.com, ⁵ketutakeh@gmail.com, ⁶maghrilisa@gmail.com

Abstrak: Pemahaman budaya politik penting dipahami oleh pemilih pemula yang dominan duduk dibangku kelas XII SMA/ sederajat karena akan membekali siswa di dalam menggunakan aspirasi politiknya pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis di Indonesia. Pemahaman budaya politik bagi pemilih pemula merupakan juga merupakan salah satu upaya meregenerasi kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Menyadari pentingnya pemahaman budaya politik bagi pemilih pemula, maka kegiatan sosialisasi ini dilakukan. Adapun tujuannya adalah mengurangi resiko golput dan praktik *money politic* pada pemilih pemula, mendewasakan mendorong terselenggaranya demokrasi yang baik dan salah satu pencegahan politisasi suku dan agama (SARA). Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi yang melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi, tanya jawab, dan studi kasus. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah peningkatan pemahaman budaya politik siswa kelas XII MAN 1 Lampung Timur yang merupakan pemilih pemula dalam pemilu 2024. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan nilai uji pre-test dan post-test sebesar 23%.

Kata Kunci: Sosialisasi, Budaya Politik, Pemilih Pemula

Abstract: Understanding political culture is important for beginner voters who predominantly sit in class XII of high school or equivalent because it will equip students to use their political aspirations in implementing democratic general elections in Indonesia. Understanding political culture for novice voters is also an effort to regenerate democratic life in Indonesia. Realizing the importance of understanding political culture for novice voters, this outreach activity was carried out. The aim is to reduce the risk of abstention and the practice of money politics among novice voters, to encourage the implementation of good democracy and to prevent the politicization of ethnicity and religion (SARA). This service activity uses a socialization method that actively involves students in discussions, questions and answers, and case studies. The result of this service activity is an increase in the understanding of political culture of class. This is evidenced by the increase in the pre-test and post-test scores of 23%.

Keywords: Socialization, Political Culture, New Voters

PENDAHULUAN

Konsep budaya politik penting dipahami oleh pemilih pemula yang dominan duduk dibangku kelas XII SMA/

sederajat, dengan harapan akan membekali siswa di dalam menggunakan aspirasi politiknya sebagai pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan

umum yang berlangsung di Indonesia. Sangat penting membangun pengetahuan dan keterampilan warga negara (*civics knowledge and civics skill*) dalam berpolitik sejak awal sekolah dan terus berlanjut selama masa sekolah dalam rangka pembentukan warga negara yang baik dan cerdas (*good & smart citizen*) (Kusmawati et al., 2022; Shapiro & Brown, 2018).

Pengetahuan yang mumpuni khususnya dalam konsep budaya politik di Indonesia agar mampu berpikir kritis dalam memahami isu-isu politik tertentu, sejarahnya, relevansinya dimasa kini. Setelah memiliki pengetahuan, pemilih pemula haruslah mempunyai sikap dalam menyalurkan aspirasi politiknya serta mempertanggungjawabkannya, dalam hal ini memiliki kemampuan untuk memahami fungsi-fungsi dan proses-proses seperti *check and balances legislative* atau peninjauan ulang hukum (*judicial review*) (Lailam, 2021). Dengan pemahaman tersebut membantu warga negara termasuk didalamnya adalah para pemilih pemula untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan peristiwa-peristiwa yang sedang aktual dalam pola jangka waktu yang lebih lama (Kesuma, 2017a).

Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat adalah jenjang yang tepat untuk menanamkan nilai nilai pendidikan politik khususnya konsep budaya politik bangsa indonesia. Hal ini dikarenakan pada jenjang SMA/ sederajat khususnya pada kelas XII mayoritas siswa telah mencapai usia 17 tahun dengan perhitungan bahwa anak masuk SD pada usia 5 tahun kemudian masuk SMP pada usia 12 tahun sehingga pada kelas XII SMA/ sederajat mereka genap berusia 17 tahun, yang berarti bahwa siswa tersebut telah menjadi pemilih pemula dalam pemilu dan berhak menyalurkan aspirasinya (Ariyanti et al., 2021).

MAN 1 Lampung Timur merupakan salah satu sekolah yang terkemuka di provinsi Lampung. Para siswanya pun tak

hanya berasal dari berbagai kabupaten/kota di provinsi Lampung, bahkan dari luar provinsi. Hal ini terbukti dengan adanya asrama bagi para siswa. Dengan beragamnya asal usul siswa-siswi MAN 1 Lampung Timur tentu sangat mempengaruhi partisipasi politik mereka terutama saat PEMILU baik PEMILUKADA, PEMILU Nasional, maupun PEMILU legislatif. Hal ini dikarenakan, walaupun usia mereka telah mencapai 17 tahun namun mereka acuh tak acuh untuk mengurus kartu tanda penduduk (KTP) sebagai prasyarat untuk menjadi pemilih dalam pemilu dengan alasan jauhnya tempat tinggal untuk membuat KTP. Namun banyak juga yang berpendapat bahwa enggan untuk menyalurkan aspirasinya dikarenakan tidak mengetahui alur/tata cara/ prasyarat untuk menjadi pemilih dalam pemilu.

Penelaahan terhadap politik di Indonesia harus memperhatikan paranan budaya politik karena ternyata mempunyai refleksi pada pelebagaan politik dan bahkan pada proses politik. Dengan demikian pembangunan politik diindonesia dapat pula diukur berdasarkan keseimbangan atau harmoni yang dicapai anatara lain oleh budaya politik dengan pelebagaan politik yang ada atau yang akan ada. Konstalasi tentang budaya politik di Indonesia dapat ditelaah melalui beberapa variabel:

- a. Konfigurasi sub kultur di Indonesia. Fenomena pluralisme di Indonesia di satu pihak menjadi mozaik dan keindahan tetapi dilain pihak menjadi sumber konflik. Oleh karenanya upaya nation building melalui character building.
- b. Budaya politik di Indonesia yang bersifat parokial kaula disatu pihak dan budaya politik partisipan dipihak lain, disatu pihak massa masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luart, pengaruh

penjajahan, feopdalisme, bapakisme, ikatan promordial sedangkan dilain pihak kaum elitnya dan sekelompok massa lain sungguh-sungguh merupakan partisan yang aktif yang kira-kira disebabkan oleh pendidikan. Jadi jelas terlihat bahwa kebudayaan politik Indonesia merupakan “mixed political culture” yang diwarnai oleh besarnya pengaruh kebudayaan parochial kaula.

- c. Sifat ikatan primordial yang masih kuat berakar yang dikenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu: puritanismedan non puritanisme. Fenomena ini masih kuat terlihat dalam gerrakan kaum elite untuk mengeksploitasi masyarakat dengan menyentuh langsung pada sub kultur tertentu dengan tujuan rekrutmen politik.
- d. Kecendrungan budaya politik indonesia yang masih diwarnai dengan sikap paternalisme dan sifat patrimonial, sebagai indikatornya: bapakisme, asal bapak senang dan lain-lain. Di indonesia budaya politik tipe parochial kaula lebih mempunyai keselarasaan untuk tumbuh dengan persepsi masyarakat terhadap obyek politik yang menyadarkan atau merindukan diri pada proses output dari penguasa.
- e. Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah apakah pelembagaan dalam sistem politik indonesia sudah siap menampung proses pertukaran (interchange) kedua variabel ini (Kesuma, 2017b)

Berdasarkan sikap, nilai-nilai, informasi dan kecakapan politik yang

dimiliki kita dapat digolongkan orientasi-orientasi warga negara terhadap kehidupan politik dan pemerintahannya. Orang yang melibatkan diri dalam kegiatan politik, sekurangnya dalam pemberian suara (voting) dan mencari informasi tentang kehidupan politik dapat dinamakan dengan budaya politik partisipan, sedangkan secara pasif patuh pada pemerintah dan undang-undang dengan tidak ikut pemilu disebut budaya politik subjek. Golongan ketiga adalah orang-orang yang sama sekali tidak menyadari adanya pemerintah dan politik disebut dengan budaya politik parochial.

Berdasarkan penggolongan diatas terdapat tiga model dalam kebudayaan politik. Pertama, masyarakat demokratis industrial dengan jumlah partisipan mencapai 40%-60% dari penduduk dewasa. Dalam sistem ini cukup banyak aktivis politik untuk menjamin adanya kompetisi partai-partai politik dan kehadiran pemberian suara yang besar. Kedua, model sistem otoriter, disini jumlah industrial dan modernis sebagian kecil, meskipun terdapat organisasi politik dan partisipan politik seperti mahasiswa, kaum intelektual dengan tindakan persuasif menentang sistem yang ada, tetapi sebagian besar jumlah rakyat hanya menjadi subjek yang pasif. Yang ketiga adalah sistem demokratis pra-industrial, dalam hanya terdapat sedikit sekali partisipan dan sedikit pula keterlibatannya terhadap pemerintahan.

Partisipasi dalam pemilu merupakan tujuan akhir dari konsep budaya politik, oleh akrena itu pemilih pemula perlu dibekali dengan pendidikan politik yang mumpuni agar mampu memaksimalkan partisipasi politik mereka terutama dalam kanchah PEMILU sebagai wujud demokratisasi warga negara. Selain itu, penguasaan pendidikan politik yang mumpuni sangat berguna untuk mencegah resiko golput dan praktik *money politic* pada pemilih pemula (Ariyanti et al., 2021), mendewasakan mendorong

terselenggaranya demokrasi yang baik (Ivalerina, 2014) dan salah satu pencegahan politisasi suku dan agama (SARA) (Priyatna, Hidayat, Eltariant, & Fernanda, 2019).

Menyadari pentingnya pemahaman budaya politik bagi pemilih pemula, maka kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk membekali siswa kelas XII sebagai pemilih pemula agar mampu berpartisipasi politik dan menyalurkan aspirasinya dengan baik, sehingga meminimalisir segala bentuk kecurangan dalam PEMILU.

METODE

Kegiatan pengabdian dengan judul Sosialisasi Budaya Politik Terhadap Pemilih Pemula Di MAN 1 Lampung Timur dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis 6-7 September 2023 bertempat di MAN 1 Lampung Timur. Kegiatan ini berlangsung selama @ 7,5 jam di mulai pukul 07.30 hingga 17.00 yang diikuti sebanyak 40 peserta. Metode kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi dengan melibatkan tim pengabdian dan siswa secara aktif dalam kegiatan diskusi, tanya jawab, brain storming, dan studi kasus.

Luaran yang ditargetkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah adanya peningkatan kesadaran tentang budaya politik terhadap pemilih pemula di MAN 1 Lampung Timur. Disamping itu siswa diharapkan mampu mengaplikasikan nilai-nilai budaya politik dalam ruang lingkup keluarga, bermasyarakat dan bernegara. Luaran tersebut dapat dilihat dari pemahaman siswa sebelum dan setelah sosialisasi dilakukan. Selain itu, luaran pengabdian ini juga berupa publikasi pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Persiapan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yaitu:

- 1) Mengirimkan surat kesediaan sekolah untuk menjadi lokasi pengabdian
- 2) Diterimanya surat balasan
- 3) Melakukan konfirmasi kesediaan menjadi pemateri
- 4) Melakukan studi pustaka tentang materi budaya politik.
- 5) Melakukan konfirmasi bahan dan alat pendukung pada panitia kegiatan
- 6) Melakukan gladi, untuk mengecek kesiapan.

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Hari pertama dilaksanakan pada tanggal 6 september 2023, kegiatan workshop dimulai dari pukul 07.30 hingga 17.00 dengan susunan acara:

- 1) Peserta menempati ruangan
- 2) Pembukaan sosialisasi oleh kepala sekolah dan Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Penyampaian materi oleh tim pengabdian yaitu: Deri Ciciria, M.Hum, Putut Wisnu Kurniawan, M.Pd, dan Dr. Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, M.Pd. Metode yang digunakan berupa sosialisasi dengan ceramah bervariasi, diskusi, brain storming, tanya jawab, dan studi kasus.
- 4) Penyuluhan diikuti 40 siswa yang berasal dari kelas XII.
- 5) Akhir kegiatan ditutup dengan foto bersama pihak penyelenggara.

Hari kedua dilaksanakan pada tanggal 7 september 2023, kegiatan workshop dimulai dari pukul 07.30 hingga 17.00 dengan susunan acara:

- 1) Peserta menempati ruangan
- 2) Brainstorming terhadap pertemuan sebelumnya.
- 3) Kegiatan pelatihan yang di pandu oleh tim pengabdian yaitu Deri Ciciria, M.Hum, Putut Wisnu Kurniawan, M.Pd, dan Dr. Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, M.Pd

- Metode yang digunakan berupa sosialisasi.
- 4) Kegiatan bersifat teoritis dan praktis dengan melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi, brain storming, tanya jawab, dan studi kasus.
 - 5) Penyuluhan diikuti 40 siswa yang merupakan peserta pertemuan sebelumnya.
 - 6) Akhir kegiatan ditutup dengan foto bersama pihak penyelenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan di hari pertama dan kedua, tim pengabdian memperoleh hasil sebagai berikut: 1) meningkatnya pemahaman dan kesadaran budaya politik siswa kelas XII MAN 1 Lampung Timur yang merupakan Pemilih Pemula. 2) siswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai budaya politik dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui pre test dan post test kegiatan diketahui bahwa siswa mengalami perkembangan pemahaman, sikap dan perilaku budaya politik yang signifikan. Evaluasi kegiatan dapat diketahui melalui nilai pretest dan posttest sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil pre test dan post test

Rata-rata Pretest	Rata-rata Posttest
66,3	87

Dengan demikian diketahui bahwa terjadi peningkatan pemahaman budaya politik siswa MAN 1 Lampung Timur yang merupakan pemilih pemula sebesar 23%.

Fenomena keterkaitan antara pemahaman siswa tentang konsep budaya politik terhadap tingkat aspirasi politik pemilih pemula merupakan gambaran tentang apa yang seharusnya dapat dilakukan seorang siswa sebagai pemilih pemula dalam penguasaan materi budaya politik baik perwujudan konsep, prinsip dan nilai budaya politik dalam lingkungan

perasaan dan sikap dimana sistem politik itu berlangsung yang termasuk didalamnya sistem tradisi, kenangan sejarah, motif, norma perasaan, dan sistem yang digambarkan dalam orientasi kognitif, afektif dan evaluatif.

Hal ini seyogyanya dapat ditampilkan atau ditunjukkan oleh sikap dan perbuatan siswa sebagai bagian dari suatu bangsa/negara yang demokratis, dimana dalam memahami konsep budaya politik tersebut seorang siswa sebagai pemilih pemula harus memiliki kemampuan mendeskripsikan pengertian budaya politik, menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik, menampilkan peran serta budaya politik partisipan.

Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat, dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat Negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Maka budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

Berdasarkan pengalaman selama ini, justru PKn sebagai pendidikan politik masih kurang mendapatkan porsi yang rendah dan diabaikan dalam pembelajaran di persekolahan maupun di pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Apabila dewasa ini kita telah sepakat bahwa pendidikan politik dalam kehidupan demokrasi sangat penting bagi penumbuh dan pengembangan masyarakat madani (civil society). Oleh sebab itu pendidikan politik dalam

pembelajaran PKn sebagai pendidikan demokrasi mutlak dijalankan dan diperluas di Indonesia.

Penelaahan terhadap politik di Indonesia harus memperhatikan peranan budaya politik karena ternyata mempunyai refleksi pada pelebagaan politik dan bahkan pada proses politik. Dengan demikian pembangunan politik di Indonesia dapat pula diukur berdasarkan keseimbangan atau harmoni yang dicapai antara lain oleh budaya politik dengan pelebagaan politik yang ada atau yang akan ada. Dalam demokrasi berpandangan bahwa manusia yang berbeda-beda tersebut pada hakekatnya mempunyai persamaan derajat.

Politik dalam demokrasi tidak berpendirian bahwa manusia itu semuanya sama, melainkan berbeda satu sama lain, tetapi disamping perbedaannya, manusia sesungguhnya sama derajatnya di depan Tuhan, sama derajat dalam nilainya dan keluhurannya sebagai manusia (*dignity of man as human being*) dalam masyarakat, sama kedudukan di dalam hukum, politik dan sebagainya.

Oleh sebab itu, setiap warga Negara/ generasi penerus bangsa di negara yang menganut sistem demokrasi dan berada dalam posisi lingkup persekolahan serta telah memiliki hak sebagai pemilih pemula haruslah memiliki kesadaran politik dalam hal ini mampu mendeskripsikan budaya politik yang dijalankan di negara Indonesia tercinta. Dengan pemahaman akan budaya politik bangsa sendiri tentu saja akan menumbuhkan aspirasi politik yang positif untuk pembangunan demokrasi menuju masyarakat madani yang berkemanusiaan, berkeadilan sosial, dan memiliki integrasi yang kokoh.

Siswa yang mempunyai pemahaman budaya politik yang rendah perlu segera diantisipasi oleh guru mata pelajaran PKn mengingat bahwa materi budaya politik sangat penting bagi siswa yang sebentar lagi akan terjun sebagai warganegara yang ikut serta dalam pesta demokrasi di

Indonesia. Pendidikan Politik yang diselenggarakan Pendidikan Kewarganegaraan dalam upaya mengembangkan kemampuan siswa dalam memandang kehidupan politik dari berbagai perspektif budaya yang berbeda dengan budaya yang mereka miliki, dan bersikap positif terhadap perbedaan budaya, ras, dan etnis. Siswa yang mempunyai kesadaran politik pluralis adalah mampu menerapkan keberagaman politik tentang makna kehidupan politik dalam keberagaman, mereka mampu bertahan untuk hidup secara berdampingan dan bertoleransi karena berbeda pandangan politik. Tentu saja hal ini sebagai perwujudan dari demokratisasi Indonesia yang bersemboyankan *Berbhineka Tunggal Ika*.

Persepsi dan pemahaman soal budaya politik sering memberi arti sebagai peradaban politik (*political civilization*) yang digandeng dengan prestasi dalam bidang peradaban dan teknologi. Oleh karena itu budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula kedalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintah. Karena itu sistem politik itu merupakan interrelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan aturan dan wewenang. Dengan kata lain, setiap negara memiliki type atau corak budaya politik yang berbeda menyesuaikan dengan peradaban bangsanya.

Tindakan dan pola perilaku individu sebagai masyarakat dalam suatu negara demokrasi sangat ditentukan oleh pola orientasi umum (*common orientation patterns*) yang nampak secara jelas sebagai cerminan budaya politik. Dengan demikian cerminan budaya politik merupakan alat pembentuk konsep (*conceptual tool*) yang sangat berharga, yang dapat menghubungkan atau mempertemukan telaahan tentang individu dalam lingkungan politik dengan sistem politik sebagai kesatuan. Budaya

politik di Indonesia yang bersifat parokial kaula disatu pihak dan budaya politik partisipan dipihak lain, disatu pihak massa masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, ikatan promordial sedangkan dilain pihak kaum elitnya dan sekelompok massa lain sungguh-sungguh merupakan partisan yang aktif yang kira-kira disebabkan oleh pendidikan. Jadi jelas terlihat bahwa kebudayaan politik Indonesia merupakan “mixed political culture” yang diwarnai oleh besarnya pengaruh kebudayaan parokial kaula.

Budaya politik dan perilaku politik (political behavior), membentuk suatu rumusan bahwa perilaku politik adalah suatu telaahan mengenai tindakan manusia dalam situasi politik, situasi politik itu sendiri sangat luas cakupannya antara lain respons emosional berupa dukungan atau tuntutan (supply of demand) maupun sikap apatis terhadap pemerintah dan kebijakan publik dan lain-lain. Untuk menghindari sikap apatis dari warga negara terhadap pemerintah melalui kebijakan-kebijakan publiknya maka diperlukan suatu sosialisasi politik guna memasyarakatkan segala kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai, dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa

Sosialisasi politik juga bermanfaat untuk melestarikan budaya politik yang selama ini diselenggarakan negara, semakin banyak orang yang mengerti dan paham mengenai budaya politik negaranya tentu hal ini berbanding lurus dengan demokratisasi yang tengah digadagadag selama ini. Tindakan dan pola perilaku individu sangat ditentukan oleh pola orientasi umum (common orientation

patterns) yang nampak secara jelas sebagai cerminan budaya politik. Dengan demikian cerminan sosialisasi politik merupakan alat pembentuk konsep (conceptual tool) budaya politik yang sangat berharga, yang dapat menghubungkan atau mempertemukan telaahan tentang individu dalam lingkungan politik dengan sistem politik sebagai kesatuan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini disambut dengan baik oleh para peserta. sebagai hasil dari kegiatan ini, para siswa kelas XII yang merupakan pemilih pemula memperoleh peningkatan pemahaman budaya politik yang dibarengi dengan kecakapan sikap dan perilaku dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan dilingkungan publik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan nilai uji pre-test dan post-test sebesar 23%. Dengan demikian, siswa kelas XII MAN 1 Lampung Timur yang merupakan pemilih pemula mampu berpartisipasi politik dengan baik. Kemampuan siswa dalam memahami konsep budaya politik memberikan kontribusi terhadap tingkat aspirasi politik siswa sebagai pemilih pemula. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan siswa dalam memahami konsep budaya politik akan ada kecenderungan tingkat aspirasi politik siswa SMA al-kautsar sebagai pemilih pemula yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, D., Nawangsih, V., RizaAisyah, R. R., Yuniarti, M., Nurrahmana, A., Maulina, R., & Presetyo, R. (2021). Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 4(3), 219-229.
- Ivalerina, F. (2014). Demokrasi dan Lingkungan. *Jurnal Hukum*

- Lingkungan Indonesia*, 1(1), 55-73.
- Kesuma, T. A. R. P. (2017a). PENGARUH PEMAHAMAN SISWA TENTANG KONSEP BUDAYA POLITIK TERHADAP KARATERISTIK ASPIRASI PEMILIH PEMULA DI SMA AL-KAUTSAR KOTA BANDAR LAMPUNG. *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 2(1), 74-83.
- Kesuma, T. A. R. P. (2017b). PENGARUH PEMAHAMAN SISWA TENTANG KONSEP BUDAYA POLITIK TERHADAP KARATERISTIK ASPIRASI PEMILIH PEMULA DI SMA AL-KAUTSAR KOTA BANDAR LAMPUNG. *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 2(1), 74-83.
- Kusmawati, W. E., Ghojaji, A. D., Eramansyah, M. G., Putri, R. E., Istianah, S., Asbari, M., & PURWANTO, A. (2022). Pancasila Based Character Education to Form Good and Smart Citizens. *Journal of Community Service and Engagement*, 2(4), 11-18.
- Lailam, T. (2021). Problem dan Solusi Penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia (Problem and Solutions for Arranging of The Checks and Balances System in The Process of Making Law and Constitutional Review in Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 12(1), 123-142.
- Priyatna, R. K., Hidayat, D. O., Eltariant, I., & Fernanda, S. A. (2019). Implementasi nilai-nilai pancasila dalam mencegah degradasi moral terhadap isu sara dan hoax. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1).
- Shapiro, S., & Brown, C. (2018). *The State of Civics Education. Center for American Progress.*